

E-Government

Pertemuan 9

Definisi

“

Layanan dan pengiriman informasi elektronik yang diberikan oleh pemerintah 24 jam sehari, 7 hari seminggu. – Norris D.F., Fletcher

”

e-Readiness

- **Conectivity:** apakah jaringan sudah tersedia secara luas dan dengan harga yang terjangkau?
- **Information Security:** apakah jaringan dan tempat penyimpanan data sudah bisa dipastikan aman?

Tahapan e-Government

- **Implementasi:** memperkenalkan kemunculannya pd masyarakat
- **Pengembangan:** situs pemerintahan bertambah, informasi menjadi semakin dinamis
- **Interaktif :** user bisa mengunduh form, berkomunikasi melalui email maupun real-time chat
- **Transaksional:** user bisa membayar layanan secara online
- **Full-electronic:** e-government sudah terintegrasi di seluruh sektor pemerintahan

Prinsip e-Government

- Membangun layanan terhadap masyarakat
- Membuat pemerintah dan layanan-layanannya lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat
- Memberikan solusi terhadap isu-isu sosial
- Menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat bagi masyarakat
- Penggunaan sumberdaya pemerintah secara efektif dan efisien

Tujuan Implementasi e-Government

- Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan
- Terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif
- Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja pemerintahan

Sasaran Pembangunan e-Government

- Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau
- Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional
- Pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan
- Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah

Menuju e-Government



Transformasi

- Manajemen Perubahan
- Perubahan Budaya Kerja
- Perubahan Proses Kerja
- SOP dan Kebijakan Politik
- Peraturan dan Perundangan
- Leadership

Pemanfaatan ICT

- Penggunaan Internet
- Penggunaan Infrastruktur Telematika
- Penggunaan Sistem Aplikasi
- Standarisasi Metadata
- Transaksi Elektronik
- Electronic Data Interchange
- Electronic Documentation

Menuju e-Government

Beberapa contoh fungsi pemerintahan yang penyelenggaraannya dapat dibantu melalui sistem elektronik adalah:

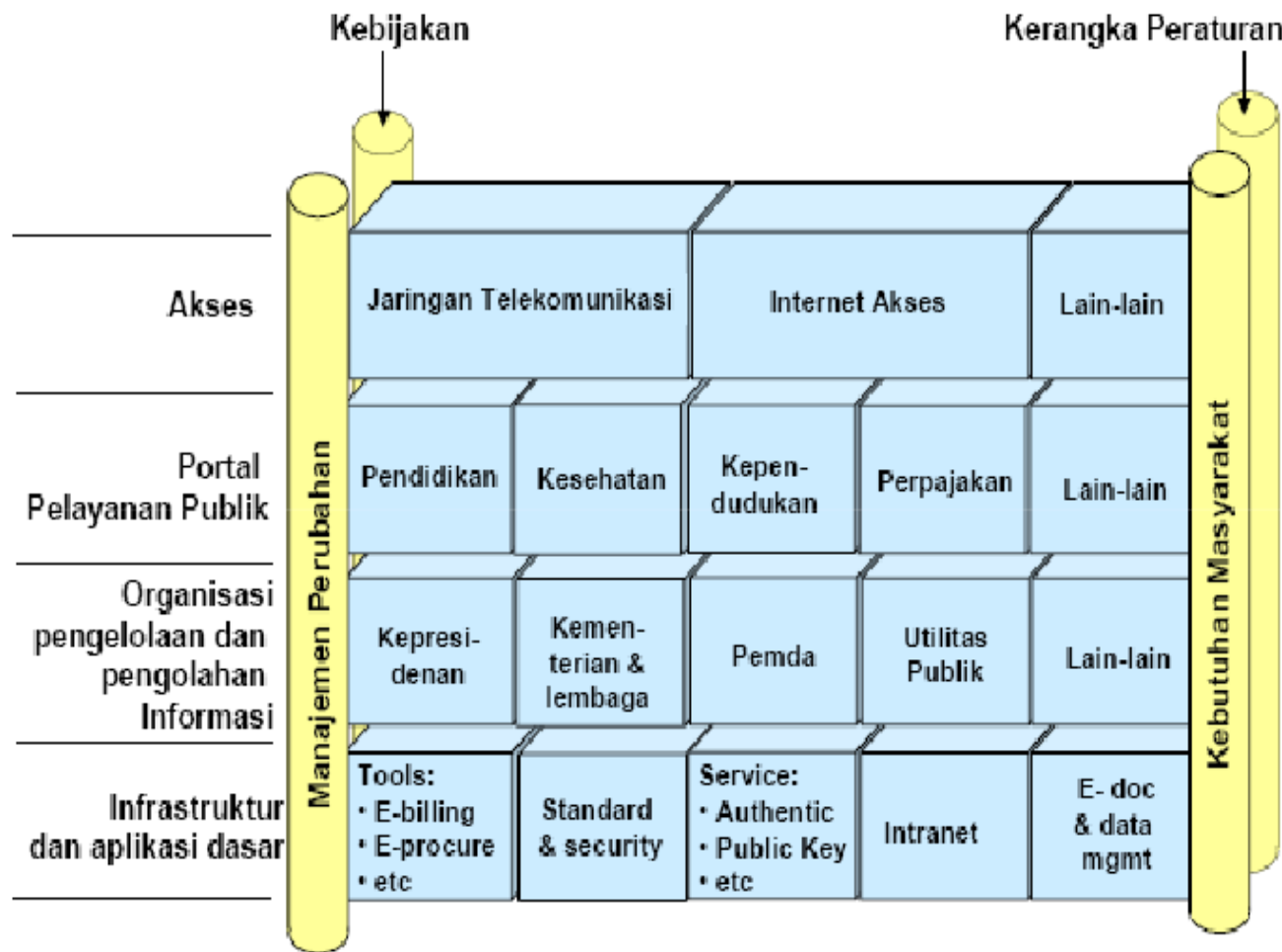
- Pelayanan Masyarakat
- Kepegawaian
- Keuangan Daerah
- Pengelolaan Aset
- Dan sebagainya

Kerangka Arsitektur e-Government

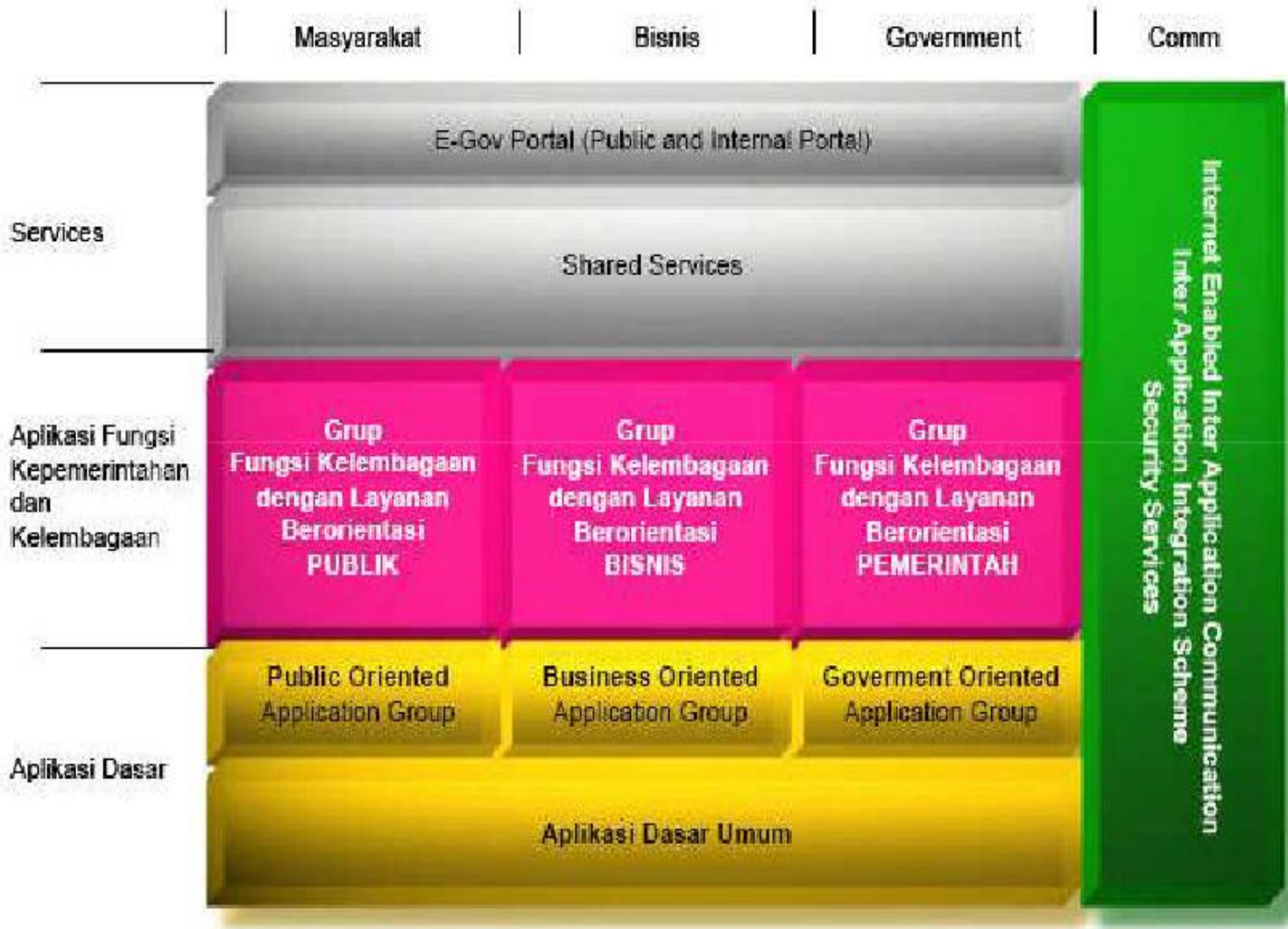
Salah satu kata kunci e-Government adalah pemanfaatan ICT. Ini artinya bahwa akan ada unsur-unsur ICT seperti sistem aplikasi, sistem infrastruktur, jaringan telematika dan lain-lain yang dipakai dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa hal mendasar tentang pemanfaatan ICT ini berkaitan dengan:

- Penggunaan Internet
- Penggunaan Infrastruktur Telematika
- Penggunaan Sistem Aplikasi
- Standarisasi Metadata
- Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik
- Sistem Dokumentasi Elektronik

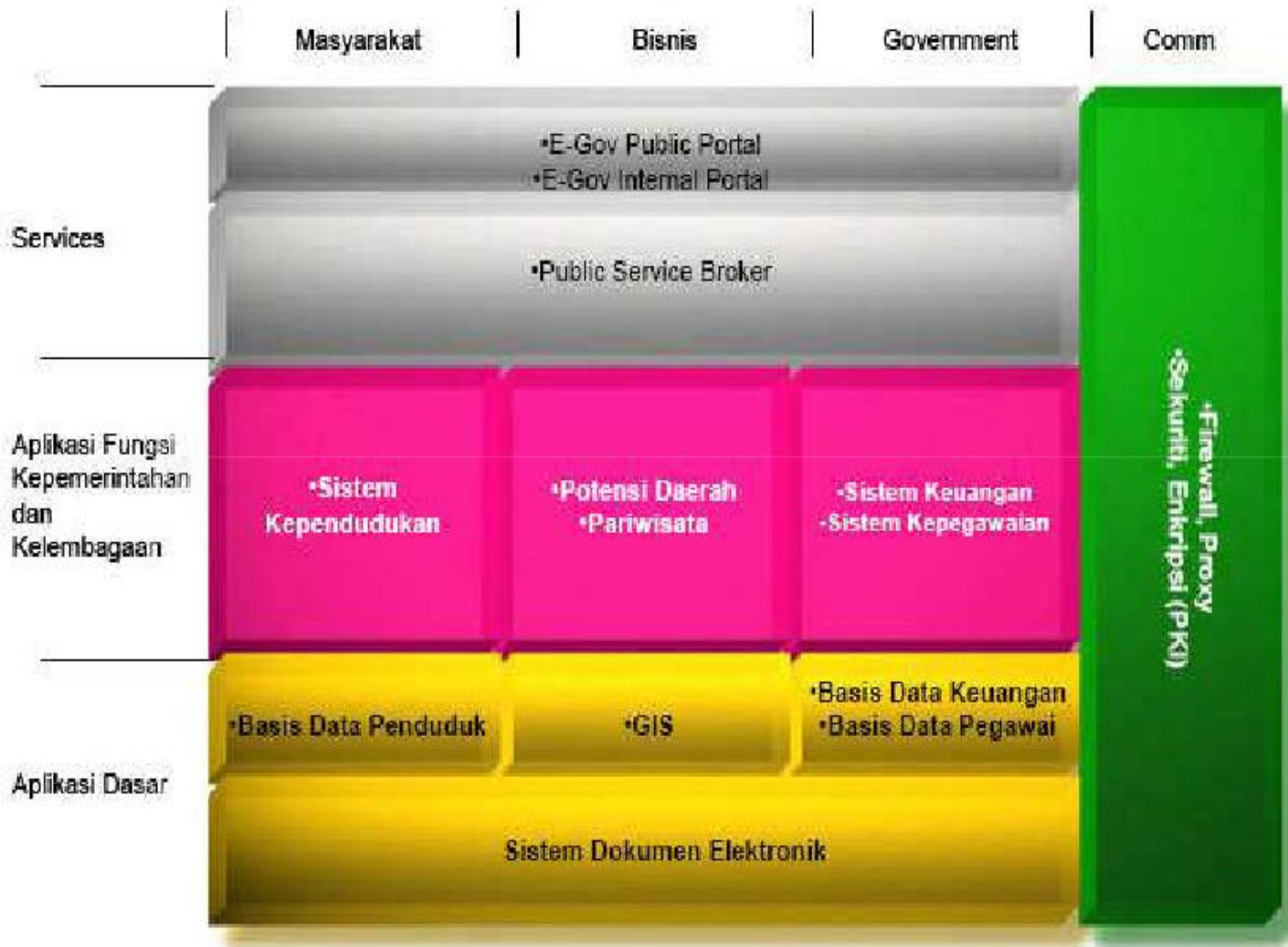
Kerangka Arsitektur e-Government



Aplikasi e-Government



Contoh Aplikasi e-Government



Kelompok Sistem

- Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat (**G2C: Government To Citizen**)
- Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan kalangan bisnis (**G2B: Government To Business**)
- Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan internal lembaga pemerintahan, atau kebutuhan dari pemerintah daerah lainnya (**G2G: Government To Government**)

Aplikasi e-Gov Pemerintah Daerah



Kependudukan

Perpajakan dan Retribusi

Pendaftaran dan Perijinan

Bisnis dan Investasi

Pengaduan Masyarakat

Publikasi Info Umum dan Pemerintahan



Surat Elektronik

Sistim Dokumen Elektronik

Sistim Pendukung Keputusan

Kolaborasi dan Koordinasi

Manajemen Pelaporan Pemerintahan



Sistem Administrasi DPRD

Sistem Pemilu Daerah

Katalog Hukum, Peraturan dan Perundangan



Sistim Informasi dan Manajemen Data

Perencanaan Pembangunan Daerah

Sistem Perencanaan Proyek

Pengelolaan Dan Monitoring Proyek

Sistem Evaluasi & Info Pembangunan



Sistem Anggaran

Sistem Kas dan Perbendaharaan

Sistem Akuntansi Daerah



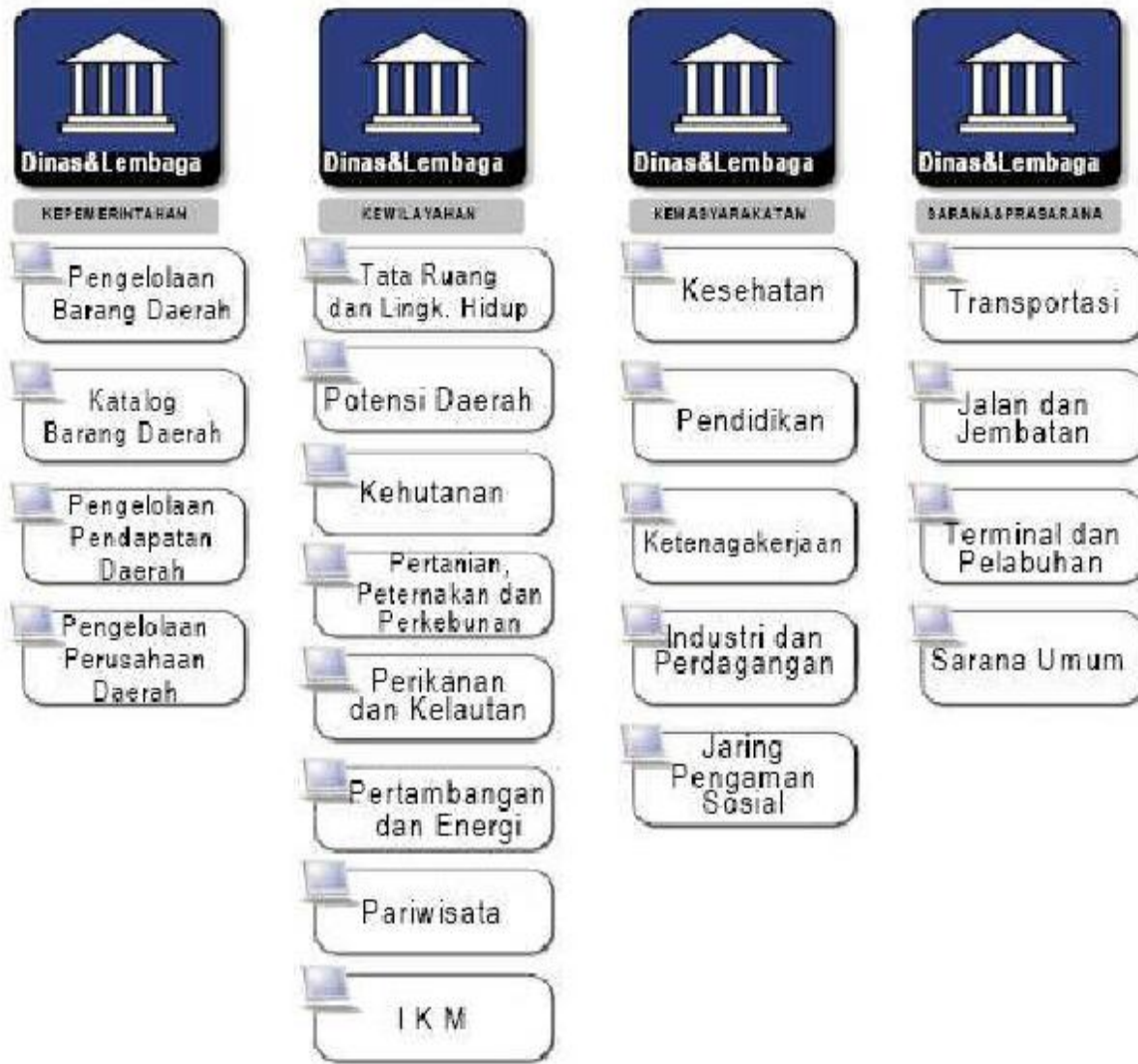
Pengadaan PNS

Sistem Absensi & Penggajian

Sistem Penilaian Kinerja PNS

Sistem Pendidikan & Latihan

Aplikasi e-Gov Pemerintah Daerah



Hambatan e-Government

- **Kultur Berbagi Belum Ada**

Kultur berbagi (*sharing*) informasi dan mempermudah urusan belum terbiasa di kalangan masyarakat Indonesia. Banyak oknum yang menggunakan kesempatan dengan mempersulit mendapatkan informasi ini.

- **Kultur Mendokumentasi Belum Lazim**

Salah satu kesulitan besar yang kita hadapi adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasikan (apa saja). Padahal kemampuan mendokumentasi ini menjadi bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi standar dari software engineering.

- **Kurangnya SDM yang Handal**

Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah umumnya jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis/ industri. Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari e-Government.

- **Infrastruktur yang Mahal dan Belum Memadai**

Infrastruktur telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar secara merata. Di berbagai daerah di Indonesia masih belum tersedia saluran telepon, atau bahkan aliran listrik. Kalaupun semua fasilitas ada, harganya masih relatif mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan untuk keperluan ini.

- **Tempat Akses yang Terbatas**

Sejalan dengan poin di atas, tempat akses informasi jumlahnya juga masih terbatas. Di beberapa tempat di luar negeri, pemerintah dan masyarakat bergotong-royong untuk menciptakan access point yang terjangkau, misalnya di perpustakaan umum. Di Indonesia hal ini dapat dilakukan di kantor pos, kantor pemerintahan dan tempat-tempat umum lainnya.

Permasalahan e-Government di Indonesia

- **Knowledge Level:** Hanya beberapa pejabat pemerintahan yang mengerti apa itu e-Government.
- **Organizational Level:** Adanya sistem sentralisasi di pemerintahan membuat tidak bisa mendelegasikan kekuasaan untuk pengambilan keputusan.
- **Financial Level:** Terbatasnya dana untuk pengembangan e-Government dan pengembangan sistem berbasis proyek tidak dapat menjamin kelangsungan dari e-Government itu sendiri.
- **Legal Level:** Infrastruktur hukum untuk mendukung e-Government belum sepenuhnya diterapkan.
- **Management Level:** Proyek-proyek e-Government biasanya tidak direncanakan dan dikelola dengan baik.
- **Technical Level:** Keterbatasan sarana prasarana dan akses terhadap e-Government.
- **Cultural Level:** Masih ada hambatan kecepatan perkembangan antara ICT dan perubahan kebudayaan.

Sabtu, 22 Maret 2008

[Hubungi Kami](#)

Updated: 19 Maret 2008

(klik disini) Pemanggilan Peserta Training of Trainers (TOT) Program P

Keyword :

Berita dan Siaran Pers

Topik Aktual

- Pidato Menteri Keuangan
- Road Map Depkeu
- Bagan Organisasi Depkeu
- Rencana Strategis Depkeu
- Kunjungan / Kegiatan Menkeu

Layanan Unggulan

Press Release
Pengumuman Terkini

Pelayanan

- Kurs Pajak
- JDI Hukum
- Kepabeanan Dan Cukai
- Perpajakan
- Pasar Modal dan Jasa Keuangan
- Pengelolaan Kekayaan Negara
- SDM
- Peraturan Perundangan
- Perbendaharaan
- Pengawasan
- Fiskal
- Pengumuman STAN
- ANGGARAN
- Perimbangan Keuangan
- Alamat Kantor Unit Eselon I
- Pengumuman Lelang Barang-Jasa
- Daftar Nama Pejabat Depkeu

Tentang Kami

Peta Situs

E-mail@depkeu

FAQ

[Link Situs](#)

Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, At
Jakarta, 19/03/08 (Press Release) - Untuk menyelaraskan dengan ke-
sosial, ekonomi, investasi, moneter dan kebijakan lainnya, Menteri Ke-
menetapkan penggunaan nilai... (Siaran Pers, 19-03-2008)



Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Sampaikan SPT Tahunan PPh OP

Jakarta, 19/03/08 (Fiscal News) - Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang PPh, Wajib Pajak (W) kekurangan pajak yang terutang selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir (2008)

Lelang Obligasi Negara Seri ZC0004 (Reopening) pada tanggal 25 Maret 2008

Jakarta, 18/03/08 (Press Release) - Lelang Obligasi Negara dalam mal dilakukan oleh Pemerintah pada tanggal 25 Maret 2008. Jumlah indik sebesar dua triliun rupiah (Siaran Pers, 18-03-2008)



Keterangan Pers Menkeu Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Jakarta, 18/03/08 (Fiscal News) Dana Alokasi Khusus Sesuai Dengan Undang-undang No.33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.... (Berita, 18-03-2008, for

Wajib Bayar PNPB Kehutanan Sudah Ditentukan

Jakarta, 17/03/08 (Press Release) - Orang atau Badan sebagai wajib t Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari penggunaan kawasan h kepentingan pembangunan di luar kegiatan ... (Siaran Pers, 17-03-2008)



[Indeks Berita](#)

2-22



Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia

Home | Site Map | Kontak | Buku Tamu | Komentar | E-Mail

Menu

- Profil .id
- Organisasi .id
- Berita .id
- Siaran Pers .id
- Dan Menteri .id
- Produk Hukum .id
- Agenda & Kegiatan .id
- Direktori .id
- Profil Daerah .id
- Data Wilayah .id
- Link Situs .id
- Glosari Pemerintahan .id
- Thesaurus Kehumasan .id
- Serba Serbi .id
- Artikel Umum .id

Artikel

e-Gov? Temukan Jawaban Disini!

Klik disini

Good Governance

Kumpulan artikel Good Governance

Kirim Pengaduan

Atau bisa dikirim ke:
PO BOX 66PDAGR1
2004 JKP 10900

Pilkada

Seputar Pilkada

SELAMAT DATANG DI WEBSITE DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Berita Nasional

MA Serahkan Keputusan ke Mendagri
Rabu, 19 Maret 2008, 10:12 WIB

[JAKARTA] Mahkamah Agung (MA) menyerahkan dua versi penghitungan suara ulang pemilihan kepala daerah (pilkada) Maluku Utara (Malut) untuk diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto. Meski demikian, MA menilai penghitungan yang dilakukan Ketua dan anggota KPUD Malut, yaitu Rahmi Husen dan Nurbaya Soleman, telah memenuhi prosedur hukum acara perdata.

Presiden Dukung Langkah Jaksa Agung
Rabu, 19 Maret 2008, 09:53 WIB

DUBAI, RABU - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendukung seluruh langkah yang dilakukan Jaksa Agung Hendarmanto Supandi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. "Presiden sudah mendapat laporan dan mendukung semua langkah yang dilakukan Jaksa Agung," kata Andi Malarangeng di pesawat saat menuju Dubai, Selasa (18/3) malam.

Kartu Kendali Minyak Tanah Diluncurkan 2 April
Selasa, 18 Maret 2008, 10:10 WIB

JAKARTA--MI: Pemerintah secara resmi akan meluncurkan program penghematan minyak tanah bersubsidi melalui pemakaian kartu kendali pada 2 April 2008.

[Berita Selanjutnya..](#)

Berita Depdagri

Mendagri akan Minta Arahan Presiden Soal Maluku Utara
Rabu, 19 Maret 2008, 09:30 WIB

JAKARTA--DDN: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto akan meminta arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal Pemilihan Umum Gubernur di Provinsi Maluku Utara.

Mendagri Prihatin atas Kondisi Rupat dan Jemur
Selasa, 18 Maret 2008, 09:54 WIB

Pekanbaru, Kompas - Menteri Dalam Negeri Mardiyanto menyatakan prihatin atas kondisi